MENGGANYANG JOKOWI

Narasi Politik dalam Wacana Digital

Aris Munandar

KBM INDONESIA

MENGGANYANG JOKOWI

Narasi Politik dalam Wacana Digital

Aris Munandar

KBM INDONESIA

PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

MENGGANYANG JOKOWI
Narasi Politik dalam Wacana Digital

Copyright @ 2026 By Aris Munandar

All right reserved

Penulis
Aris Munandar
Desain Sampul
Aswan Kreatif
Tata Letak
Husnud Diniyah
Editor
Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.
Background isi buku di ambil dari https://www.freepik.com/
Official
Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)
Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia
Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021
081357517526 (Tlpn/WA)
Website
https://penerbitkbm.com
www.penerbitbukumurah.com
Email
naskah@penerbitkbm.com
Distributor
https://penerbitkbm.com/toko-buku/
Youtube
Penerbit KBM Sastrabook
Instagram
@penerbit. kbmindonesia
@penerbitbukujogja
E-ISBN: 978-634-278-374-0
Cetakan ke-1, Mei 2026
14,8 x 21 cm, viii + 228 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Saya sungguh tidak habis pikir ketika banyak orang memandang politik sebagai sebuah kebaikan tunggal. Ketika politik berjalan sesuai harapan mereka, politik dipuji sebagai jalan keselamatan. Tetapi ketika hasilnya berbeda, politik segera dituduh jahat, kotor, penuh pengkhianatan, bahkan dianggap sumber dari seluruh kerusakan bangsa.

Padahal politik tidak pernah sesederhana itu.

Selain "kita", selalu ada "mereka". Selain "aku", selalu ada "kamu". Politik hidup justru karena perbedaan itu. Naif sekali jika kita berharap politik selalu menjadi ruang yang damai, seragam, dan sepakat dalam segala hal. Politik lahir dari benturan kepentingan. Dari perebutan pengaruh. Dari pertanyaan sederhana tetapi sangat menentukan: siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana.

Para ahli sudah lama menjelaskan hal ini.

Carl Schmitt mengatakan politik pada dasarnya adalah pembedaan antara kawan dan lawan. Politik muncul ketika kita mulai menentukan siapa yang kita anggap bersama kita, dan siapa yang kita anggap berseberangan. Chantal Mouffe bahkan lebih jauh lagi. Ia mengatakan demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi tanpa konflik. Demokrasi yang sehat justru

demokrasi yang mampu mengelola konflik agar tidak berubah menjadi perang total.

Harold Lasswell merumuskannya dengan sangat sederhana: politics is who gets what, when, how. Politik adalah soal distribusi. Soal siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang kehilangan, dan siapa yang menentukan aturan mainnya. David Easton menyebut politik sebagai pembagian nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Bahkan sejak Aristotle, manusia sudah dipahami sebagai zoon politikon—makhluk politik—karena hidup bersama berarti hidup bersama perbedaan.

Karena itu saya selalu berhati-hati ketika menilai politik.

Saya berusaha netral.

Tetapi saya juga sadar, netralitas sering kali dianggap keberpihakan yang terselubung. Kekaguman saya terhadap perubahan yang terjadi, terutama pembangunan infrastruktur pada masa Joko Widodo, tentu tidak pernah dianggap netral oleh mereka yang membenci Jokowi, atau oleh mereka yang sejak awal tidak pernah memilihnya.

Bagi sebagian orang, kekaguman itu langsung dibaca sebagai dukungan politik.

Di situlah ketertarikan saya bermula.

Bagaimana sebenarnya belajar menjadi netral?

Apakah netral berarti tidak memilih siapa pun? Apakah netral berarti menolak semua pujian dan semua celaan? Ataukah netral justru berarti berani melihat fakta tanpa terburu-buru menempelkan emosi?

Saya mulai belajar dari hal kecil: memilih diksi. Menghindari kata sifat yang terlalu memuja. Menjaga jarak dari kata-kata yang terlalu menghukum. Tidak mudah menggunakan kata hebat, gagal, luar biasa, atau mengerikan. Karena sering kali, politik rusak bukan karena faktanya, tetapi karena cara kita menamai fakta itu.

Di sekitar Jokowi, saya melihat itu sangat jelas.

Politik tidak lagi sekadar soal kebijakan. Ia berubah menjadi pertarungan makna. Orang tidak hanya menilai program, tetapi membangun identitas melalui kata-kata.

Di satu sisi, narasi anti-Jokowi tumbuh sangat keras. Ia disebut boneka oligarki, petugas partai, presiden boneka, bahkan simbol rezim yang dianggap otoriter, anti kritik, dan anti demokrasi. Ada yang menuduhnya pro asing, antek asing, pro China, bahkan menghidupkan kembali stigma lama seperti komunis atau PKI.

Menjelang akhir kekuasaan, tuduhan itu bergeser menjadi lebih personal dan lebih tajam. Muncul istilah dinasti politik, cawe-cawe kekuasaan, pengkhianat reformasi, hingga new orba—Orde Baru versi baru. Sebuah upaya untuk membingkai Jokowi sebagai wajah baru dari kekuasaan lama: lebih halus, tetapi tetap mengontrol. Bahkan isu seperti ijazah palsu pun digunakan sebagai senjata politik. Seolah serangan terhadap dokumen pribadi dapat meruntuhkan legitimasi politik seorang presiden.

Tetapi pada saat yang sama, narasi tandingan tumbuh sama kuatnya.

Bagi para pendukungnya, Jokowi adalah simbol kesederhanaan. Ia disebut merakyat, sederhana, blusukan, pekerja keras, dekat dengan rakyat kecil. Ia dipandang sebagai pemimpin yang bersih, rendah hati, anti korupsi, dan tidak lahir dari elite lama.

Dalam narasi ini, Jokowi bukan petugas partai, melainkan pemimpin rakyat. Bukan pencitraan, tetapi kerja nyata. Pembangunan infrastruktur, stabilitas politik, dan keberanian mengambil keputusan membuatnya disebut visioner, tegas, nasionalis, bahkan bapak pembangunan. Ia diposisikan sebagai simbol perubahan dan presiden rakyat kecil yang bekerja, bukan sekadar berbicara.

Dua kutub ini memperlihatkan sesuatu yang sangat penting.

Politik modern bukan hanya pertarungan kekuasaan. Ia adalah pertarungan cerita.

Satu orang yang sama dapat dibaca sebagai ancaman oleh sebagian orang, dan sebagai harapan oleh sebagian yang lain. Satu kebijakan yang sama bisa dianggap penyelamatan bangsa oleh satu kelompok, dan dianggap pengkhianatan oleh kelompok lain.

Fakta tetap satu. Tetapi tafsirnya bisa seribu.

Di sinilah politik menjadi menarik sekaligus berbahaya.

Siapa yang menguasai narasi, sering kali lebih dulu menguasai persepsi. Dan dalam banyak kasus, persepsi jauh lebih kuat daripada fakta itu sendiri.

Buku ini lahir dari kegelisahan itu.

Bukan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Bukan pula untuk memaksa pembaca berdiri di satu kubu tertentu. Buku ini mencoba menelusuri bagaimana narasi dibangun, bagaimana opini diproduksi, bagaimana kebencian dipelihara, dan bagaimana kekaguman dibentuk.

Karena politik sering kali tidak dimulai di parlemen.

Ia dimulai dari kata-kata.

Dari rumor kecil. Dari kalimat pendek. Dari potongan video. Dari meme yang terlihat sepele. Dari tagar yang tampak sederhana.

Dan dari sana, sebuah bangsa bisa bergerak.

Pada akhirnya, saya mempersilakan pembaca sendiri mencari tahu: di mana sebenarnya keberpihakan buku ini berdiri.

Mungkin Anda akan menemukan saya terlalu dekat dengan Jokowi. Mungkin juga terlalu jauh.

Tetapi mungkin, justru di antara jarak itulah, kita bisa melihat politik dengan lebih jernih.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **vii**
PROLOG **1**

Bagian 1

FONDASI POLITIK DIGITAL INDONESIA **9**
Bab 1 Tukang Kayu dari Solo 11
Bab 2 Eksperimen Politik di Solo 21
Bab 3 Jakarta: Panggung yang Lebih Besar 29
Bab 4 Jalan Menuju Istana 37
Bab 5 Pemilu yang Membelah Bangsa 47
Bab 6 Mesin Narasi Politik 61
Bab 7 Politik Jalanan 71
Bab 8 Mesin Buzzer Politik 101

Bagian 2

ESKALASI KONFLIK NARASI DIGITAL **111**
Bab 9 Meme Politik dan Bahasa Satire 113
Bab 10 Polarisasi Publik 131
Bab 11 Delegitimasi Konstitusi 143
Bab 12 Era Video Pendek 155
Bab 13 Satire Politik Digital 167
Bab 14 Serangan ke Ranah Personal 179

Bagian 3

POLITIK KECURIGAAN DAN PERANG PERSEPSI 193

Bab 15 Politik Kecurigaan 195

Bab 16 Negara, Platform, dan Kekuasaan Algoritma 205

Bab 17 Setelah Jokowi: Masa Depan Perang Narasi..... 217

EPILOG 223

PROLOG

Pagi itu linimasa media sosial di Indonesia seperti terbakar.

Belum pukul enam pagi, sebuah potongan video sudah beredar dari satu grup WhatsApp ke grup yang lain. Tidak jelas siapa yang pertama mengirimnya. Tetapi dalam hitungan menit video itu sudah muncul di banyak tempat: di grup keluarga, di grup alumni sekolah, di kanal Telegram politik, lalu melompat ke Twitter—atau apa pun nama platform itu hari ini.

Videonya pendek. Hanya beberapa detik.

Namun cukup untuk memicu ribuan komentar.

Beberapa akun langsung menuliskan kesimpulan panjang. Yang lain hanya menempelkan satu kalimat pendek.

"Ini buktinya."

"Akhirnya terbongkar."

"Propaganda lagi."

"Jangan percaya potongan video."

Dalam waktu kurang dari satu jam, linimasa berubah menjadi arena perdebatan. Tagar mulai naik. Meme bermunculan. Potongan gambar lama diangkat kembali seolah-olah baru saja terjadi.

Dan seperti yang sudah sering terjadi dalam politik Indonesia satu dekade terakhir, keributan itu perlahan mengerucut pada satu nama.

Jokowi.

Nama itu muncul di ribuan komentar.

Ada yang membela. Ada yang mengecam. Ada yang menertawakan. Ada yang menuduh.

Di satu sisi ada orang yang menulis bahwa ia adalah presiden yang bekerja keras membangun jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Di sisi lain muncul tuduhan-tuduhan yang jauh lebih keras—dari kritik kebijakan, tudingan ideologis, sampai serangan personal.

Peristiwa seperti ini bukan hal baru.

Dalam satu dekade terakhir, adegan yang hampir sama muncul berkali-kali. Kadang dipicu oleh pidato presiden. Kadang oleh kebijakan pemerintah. Kadang oleh isu politik yang sama sekali berbeda.

Namun ujungnya sering sama.

Percakapan kembali mengarah pada satu nama.

Jokowi.

Jika seseorang mengikuti percakapan publik di Indonesia beberapa tahun terakhir, ia akan melihat pola yang berulang. Nama Jokowi hampir selalu hadir dalam perdebatan politik.

Di warung kopi. Di kantor. Di ruang kelas. Bahkan di meja makan keluarga.

Padahal ia bukan lagi tokoh baru. Ia telah memenangkan pemilihan presiden dua kali.

Dalam logika demokrasi, kemenangan seperti itu biasanya menunjukkan satu hal sederhana: seorang pemimpin memiliki dukungan besar dari rakyat.

Namun ruang publik sering memperlihatkan gambaran yang berbeda.

Dukungan memang ada.

Tetapi kritik tidak pernah berhenti.

Serangan juga tidak pernah benar-benar hilang.

Setiap hari selalu ada sesuatu. Satu isu baru. Satu perdebatan baru. Satu tuduhan baru.

Di era media sosial, tuduhan-tuduhan itu tidak selalu datang dalam bentuk argumen panjang. Kadang ia hadir sebagai meme, potongan video, atau slogan digital.

Bahkan kadang hanya satu kata aneh.

Salah satunya adalah kata yang sempat beredar luas di internet: "fufufafa." Bagi orang yang tidak mengikuti percakapan media sosial, kata itu mungkin terdengar seperti lelucon yang tidak berarti. Tetapi di dunia digital, kata-kata seperti itu bisa berubah menjadi simbol ejekan politik. Ia dipakai dalam meme, komentar singkat, bahkan video pendek yang beredar dari satu platform ke platform lain.

Fenomena seperti ini menunjukkan sesuatu yang baru dalam politik Indonesia. Serangan politik tidak selalu muncul sebagai

debat kebijakan. Kadang ia hadir hanya dalam satu kata yang diulang ribuan kali hingga menjadi bagian dari percakapan publik.

Ada pula slogan-slogan yang terdengar lebih aneh lagi. Kalimat seperti "Wi Wok De Tok Not Only Tok De Tok" pernah beredar luas sebagai bentuk sindiran politik di media sosial. Tidak semua orang memahami maknanya, tetapi frasa itu tetap menyebar cepat—dibagikan, diubah, dan dijadikan bahan ejekan digital.

Di sisi lain, bahasa politik juga bisa menjadi jauh lebih keras. Dalam beberapa perdebatan muncul frasa seperti "anak haram konstitusi." Frasa seperti ini tidak lagi sekadar kritik terhadap kebijakan. Ia langsung mempertanyakan legitimasi politik seseorang.

Serangan bahkan kadang bergerak ke wilayah yang lebih simbolik.

Sebuah kunjungan ke makam keluarga presiden pun bisa berubah menjadi peristiwa politik. Kamera merekam. Potongan video beredar. Linimasa kembali dipenuhi perdebatan.

Salah satu peristiwa yang sempat ramai dibicarakan terjadi ketika beberapa tokoh publik—Rismon, Tifa, dan Roy Suryo—datang berziarah ke makam ibunda Jokowi. Peristiwa itu sebenarnya sederhana: sebuah kunjungan ke tempat peristirahatan terakhir seorang ibu. Tetapi di ruang digital, maknanya segera berubah. Foto dan video beredar cepat. Komentar bermunculan.

Sebagian orang melihatnya sebagai kritik simbolik terhadap kekuasaan. Sebagian lain menganggapnya tindakan yang tidak pantas.

Peristiwa seperti ini memperlihatkan sesuatu yang baru dalam politik Indonesia.

Politik tidak lagi hanya berlangsung di parlemen. Ia juga berlangsung di linimasa. Di grup WhatsApp. Di kanal YouTube. Di potongan video TikTok.

Di ruang yang digerakkan algoritma, satu potongan video bisa memicu ribuan komentar. Satu meme bisa membelah ruang publik. Satu slogan bisa berubah menjadi senjata politik.

Selama lebih dari satu dekade, hampir tidak ada tokoh politik Indonesia yang namanya begitu sering muncul dalam pusaran konflik digital seperti Jokowi. Setiap periode melahirkan gelombang narasi baru: tuduhan lama dihidupkan kembali, slogan baru diciptakan, meme baru diproduksi.

Serangan tidak pernah benar-benar hilang.

Ia hanya berubah bentuk.

Menunggu momentum berikutnya untuk kembali viral.

Pertanyaannya kemudian sederhana, tetapi penting.

Mengapa seorang presiden yang memenangkan dua pemilu tetap menjadi sasaran serangan politik yang begitu intens?

Mengapa namanya hampir selalu hadir dalam konflik politik Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir?

Buku ini tidak ditulis untuk membela siapa pun. Tidak juga ditulis untuk menyerang siapa pun.

Buku ini hanya mencoba melakukan satu hal sederhana: melihat fakta-fakta yang terjadi dan menempatkannya dalam satu cerita.

Serangan terhadap Jokowi datang dari banyak arah.

Sebagian berasal dari rival politik. Sebagian datang dari kelompok masyarakat sipil. Sebagian muncul dari perdebatan kebijakan. Sebagian lagi lahir dari mesin produksi narasi di ruang digital.

Karena itu fenomena ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu peristiwa.

Ia adalah rangkaian panjang.

Rangkaian yang berlangsung lebih dari satu dekade dalam politik Indonesia.

Buku ini mencoba menelusuri rangkaian itu.

Bagaimana seorang wali kota dari Solo perlahan masuk ke panggung politik nasional. Bagaimana ia memenangkan dua pemilu presiden. Dan bagaimana, sepanjang perjalanan itu, berbagai serangan politik terus muncul, berubah bentuk, lalu muncul lagi.

Namun sebelum semua cerita itu dimulai, ada satu pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu.

Mengapa seorang tukang kayu dari Solo bisa menjadi tokoh yang begitu sering dipuji—sekaligus begitu sering diganyang?

Jawabannya tidak dimulai di Istana Negara.

Jawabannya justru dimulai jauh sebelum itu.

Di sebuah kota bernama Solo.

Di kota inilah cerita itu sebenarnya dimulai.

Bukan di Istana Negara. Bukan di ruang rapat kekuasaan. Bukan pula di panggung politik nasional yang penuh sorotan kamera.

Cerita itu bermula dari kehidupan yang jauh lebih sederhana: seorang pengusaha kecil yang setiap hari bergelut dengan kayu, pesanan mebel, dan pelanggan yang datang silih berganti.

Tidak ada yang membayangkan bahwa dari kehidupan yang tampak biasa itu akan lahir seorang tokoh yang kelak memimpin negara dengan lebih dari 270 juta penduduk—dan pada saat yang sama menjadi pusat pertarungan narasi politik paling bising di era media sosial.

Untuk memahami mengapa seorang presiden bisa dipuji begitu tinggi sekaligus diganyang begitu keras, kita perlu kembali ke titik awal.

Kembali ke Solo.

Ke tempat di mana semuanya dimulai.

Kepentingan politik mampu mengamplifikasi video berdurasi beberapa detik menjadi ribuan komentar yang membentuk persepsi publik

MENGGANYANG JOKOWI

Narasi Politik dalam Wacana Digital

Buku ini membedah bagaimana narasi negatif terhadap Jokowi dibangun, disebarkan, dan diganyang habis-habisan di ruang digital.

Dari tuduhan tanpa dasar, labelisasi politis, hingga serangan personal—semua dikupas dalam perspektif wacana dan kepentingan politik di baliknya.

Kritik sah dalam demokrasi penting, tapi ketika berubah menjadi fitnah sistematis, kebencian terorganisir, dan propaganda digital, yang lahir bukan lagi opini, melainkan kerusakan pada nalar publik.

Mengganyang Jokowi adalah ajakan untuk melawan arus kebencian dengan akal sehat, fakta, dan keberanian berpikir jernih.

ARIS MUNANDAR

Aris Munandar nama yang asing, bahkan tak terdengar. Ia tidak datang untuk membela atau menyerang, sekadar mengamati bagaimana politik bekerja di balik hiruk-pikuk opini publik. Perhatiannya tertuju pada dinamika politik, komunikasi publik, pertarungan narasi di ruang digital, dan pembelahan siapa-dimana. Melalui tulisan akademik dan opini publik, ia berusaha menghadirkan sudut pandang yang tenang, kritis, dan menjaga nalar tetap jernih.

> "DI ERA DIGITAL, FITNAH BISA MENYEBAR LEBIH CEPAT DARIPADA FAKTA. TUGAS KITA ADALAH MELAWAN KEBISINGAN DENGAN NALAR."

KBM INDONESIA
penerbitkbm.com

PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-374-0
9 786342 783740